

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 100.3.1.2/13 TAHUN 2024

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO,

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo tanggal 22 Nopember 2024;
 2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo tanggal 29 November 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam keadaan tertentu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo atau Bupati Purworejo dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah di sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam hal :
 a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana;

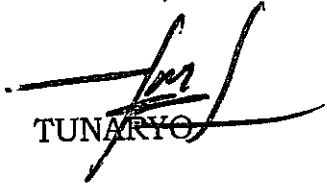
- b. akibat kerjasama dengan pihak lain; dan/atau
- c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Purworejo dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo;
- d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 29 November 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO
KETUA,


TUNARYO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025

NO.	JUDUL RAPERDA	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN DARI	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAM-PAIAN	KET.
			BARU	UBAH		NA	PENJ/ KET			
1.	Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	a. Tugas dan Kewenangan; b. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; c. Pencegahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; d. Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh; e. Kerja Sama Pemerin-tah Daerah dan Badan Usaha;	Baru		Pasal 1 PP No.14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2021	NA		a. Dinper- kintan; b. DPUPR; c. DLHP; d. DPMPTSP; e. BPKPAD; f. Satpol PP Damkar g. BPN; dan h. Bagian Hukum.	MS I (Februari)	INISIATIF PRAKARSA DPRD (NA telah tersedia)

NO.	JUDUL RAPERDA	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN DARI	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAM-PAIAN	KET.
			BARU	UBAH		NA	PENJ/ KET			
		f. Pemanfaatan Rumah Susun (Fungsi Hunian dan Campuran); g. Pembinaan; h. Peran Serta Masyarakat; i. Pendanaan.								
2.	Pelindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional	a. Bentuk Ekspresi Budaya Tradisional; b. Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional; c. Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional; d. Penghargaan; e. Pendidikan Ekspresi Budaya Tradisional; f. Peran Serta Masyarakat dan Pelaku Usaha; g. Tim Ahli Ekspresi Budaya Tradisional; h. Pendanaan; dan i. Pembinaan dan Pengawasan.	Baru		a. Lampiran I Huruf V UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.	NA		a. Dindikbud; b. Bakesbangpol; c. Bappeda-litbang; d. Bagian Hukum.	MS I (Februari)	INISIATIF PRAKARSA DPRD (NA telah tersedia)

NO.	JUDUL RAPERDA	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN DARI	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAM-PAIAN	KET.
			BARU	UBAH		NA	PENJ/ KET			
3.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro	a. Perubahan Pasal 5 yg mengatur Kriteria Usaha Mikro; b. Penambahan Pasal yg mengatur Perizinan berusaha berbasis resiko; c. Penambahan pasal yg mengatur Penyediaan layanan dan pendampingan bantuan hukum bagi Usaha Mikro; d. Penambahan pasal yg mengatur Pemulihan Usaha Mikro; e. Penambahan pasal yg mengatur Basis data Tunggal Usaha Mikro; f. Penambahan pasal yg mengatur penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro pada infrastruktur publik;		Ubah	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.		Penj/ Ket	a. Dinas KUKMP; b. Bappeda- litbang; c. Bagian Hukum.	MS I (Februari)	INISIATIF PRAKARSA DPRD (NA telah tersedia)

NO.	JUDUL RAPERDA	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN DARI	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAM-PAIAN	KET.
			BARU	UBAH		NA	PENJ/ KET			
		g. Penambahan pasal yg mengatur Pengelolaan terpadu Usaha Mikro h. Penambahan pasal yg mengatur pengadaan barang/ jasa pemerintah; i. Penambahan pasal yg mengatur pencatatan dan pembukuan Sistem Aplikasi laporan Keuangan; dan j. Penambahan Pasal yg mengatur Penyelenggaraan Inkubasi.								
4.	Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas	a. Inventarisasi dan Analisis Dampak Lalu Lintas; b. Pusat Kegiatan, Permukiman dan Infrastruktur Yang Wajib Analisis Dampak Lalu Lintas;	Baru		PP Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Peraturan Menteri Perhubungan	NA		a. DINHUB; b. Bappeda- litbang; c. Satpol PP; d. Bagian Hukum.	MS I (Februari)	INISIATIF PRAKARSA DPRD (NA telah tersedia)

NO.	JUDUL RAPERDA	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN DARI	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAM-PAIAN	KET.
			BARU	UBAH		NA	PENJ/ KET			
		c. Penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas; d. Penilaian dan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas; e. Kompetensi Tenaga Ahli Penyusun; f. Kompetensi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas; g. Pengawasan Analisis Dampak Lalu Lintas; d h. Pendanaan.			Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Analisis Dampak Lalu Lintas;					
5.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029	a. Gambaran Umum Kondisi Daerah; b. Gambaran Keuangan Daerah; c. Permasalahan dan Isu Strategis Daerah; d. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran; e. Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah;	Baru	-	Pasal 41 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah	NA		a. Bapperida b. Seluruh Perangkat Daerah c. Bagian Hukum Setda	MS I (Maret)	USULAN EKSEKUTIF (NA tersedia akhir November 2024)

NO.	JUDUL RAPERDA	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN DARI	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAM-PAIAN	KET.
			BARU	UBAH		NA	PENJ/ KET			
		f. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah; dan g. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.			tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.					
6.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa	Perubahan pengaturan terhadap: a. Naksud dan tujuan; b. Keanggotaan BPD; c. Kelembagaan BPD; d. Fungsi dan tugas; e. tata cara menggali, menampung, dan menyalurkan aspirasi; f. Hak, Kewajiban dan wewenang; g. Peraturan Tata tertib dan mekanisme musyawarah; h. Pemberhentian sementara; i. Pembinaan dan Pengawasan; dan j. Pendanaan.		Ubah	- Pasal 56, Pasal 57, Pasal 62, dan Pasal 118 UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa		Penj/ Ket	a. DP3APMD b. Inspektorat Daerah c. Bagian Hukum Setda d. Keca- matan	MS II (Juni)	INISIATIF PRAKARSA DPRD (Naskah Penjelasan/ Keterangan telah tersedia, perlu penyesuaian dengan UU No.3 Tahun 2024)

NO.	JUDUL RAPERDA	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN DARI	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAM-PAIAN	KET.
			BARU	UBAH		NA	PENJ/ KET			
7.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah. Desa	Perubahan pengaturan terhadap: a. Kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban Kepala Desa b. Kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban Perangkat Desa		Ubah	- Pasal 26 dan Pasal 50 UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa		Penj/ Ket	a. DP3APMD b. Inspekto- rat Daerah c. Bagian Hukum Setda d. Bagian Organisasi Setda e. Keca- matan	MS II (Juni)	USULAN EKSEKUTIF (Naskah Penjelasan/ Keterangan belum tersedia, anggaran penyusunan diusulkan dlm APBD TA 2025)
8.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pemilihan Kepala Desa	Perubahan pengaturan terhadap: a. Masa Jabatan Kepala Desa; dan b. Pencalonan Kepala Desa.		Ubah	- Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 39, dan Pasal 118 UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa		Penj/ Ket	a. DP3APMD b. Inspekto- rat Daerah c. Bagian Hukum Setda	MS II (Juni)	INISIATIF PRAKARSA DPRD (Naskah Penjelasan/ Keterangan Belum tersedia, perlu penyesuaian dengan UU No.3 Tahun 2024)

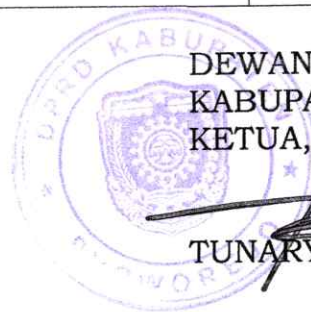
NO.	JUDUL RAPERDA	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN DARI	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAM-PAIAN	KET.
			BARU	UBAH		NA	PENJ/ KET			
9.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Perubahan pengaturan terhadap: a. Pengangkatan Perangkat Desa, b. Kosultasi; dan c. Rekomendasi		Ubah	- Pasal 26, Pasal 50, Pasal 50A, dan Pasal 118 UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa		Penj/ Ket	a. DP3APMD b. Inspekto- rat Daerah c. Bagian Hukum Setda	MS II (Juni)	USULAN EKSEKUTIF (Naskah Penjelasan/ Keterangan belum tersedia, anggaran penyusunan diusulkan dlm APBD TA 2025)
10.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah	a. Perubahan ketentuan masa penyertaan modal BUMD pada PT Bank Jateng, Perumda GHM, Perumda Air Minum Tirta Perwitasari, dan Perumda Aneka Usaha; b. Penghapusan ketentuan Penyertaan modal pada Perumda BPR Bank Purworejo; c. Perubahan roadmap Penyertaan Modal BUMD.		Ubah	Angka 230 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan		Penj/ Ket	a. Bag PSDA; b. BPKPAD; c. Bapperida; d. Inspekto- rat Daerah e. Bag Hukum Setda	MS II (Juni)	INISIATIF PRAKARSA DPRD (Naskah Penjelasan/ Keterangan belum tersedia, dianggarkan dalam APBD TA 2025)

NO.	JUDUL RAPERDA	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN DARI	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAM-PAIAN	KET.
			BARU	UBAH		NA	PENJ/ KET			
11.	Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo	a. Klausula pencabutaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo b. Klausula pernyataan tidak berlakunya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo	Baru		Angka 158 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	NA		a. Bag PSDA; b. BPKPAD; c. Bapperida; d. Inspekto-rat Daerah e. Bag Hukum Setda.	MS III September	INISIATIF PRAKARSA DPRD (Naskah Penjelasan/ Keterangan belum tersedia, dianggarkan dalam APBD TA 2025)
12	Peraturan Daerah tentang pengelolaan Pasar Rakyat	a. Pengelolaan Pasar Rakyat; b. Klasifikasi Pasar Rakyat; c. Penataan pasar Rakyat; d. Sarana Prasarana Pasar Rakyat; e. Perizinan tempat berdagang; f. Hak, kewajiban dan larangan;	Baru		UU No 23 tahun 2014 pemerintahan daerah yang menyatakan izin pengelolaan pasar rakyat kewenangan kabupaten	NA		a. DKUKMP; b. Satpol PP damkar; c. Bagian Pereko-nomian dan SDA Setda; d. Bagian Hukum Setda;	MS III September	INISIATIF PRAKARSA DPRD (Naskah Penjelasan/ Keterangan belum tersedia, dianggarkan dalam APBD TA 2025)

NO.	JUDUL RAPERDA	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN DARI	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAM-PAIAN	KET.
			BARU	UBAH		NA	PENJ/ KET			
		g. Partisipasi masyarakat; dan h. Pembinaan dan Pengawasan.								
13	Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Koperasi	a. Landasan, asas dan tujuan; b. Fungsi Peran dan Prinsip; c. Pembentukan Koperasi; d. Usaha koperasi yang melaksanakan prinsip syariah; e. Keanggotaan dan perangkat organisasi koperasi; f. Kegiatan usaha koperasi; g. Penilaian kesehatan koperasi; h. Pembinaan dan pengawasan koperasi; dan i. Pemberdayaan dan perlindungan koperasi.	Baru		UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	NA		a. DKUKMP; b. Bagian Perekonomian dan SDA Setda; dan c. Bagian Hukum Setda;	MS III September	INISIATIF PRAKARSA DPRD (Naskah Penjelasan/ Keterangan belum tersedia, dianggarkan dalam APBD TA 2025)

NO.	JUDUL RAPERDA	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN DARI	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAM-PAIAN	KET.
			BARU	UBAH		NA	PENJ/ KET			
14	Penataan Dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi	a. Jenis Infrastruktur Pasif Telekomunikasi; b. Penataan dan Pengendalian; c. Fasilitas Infrastruktur Pasif Telekomunikasi; d. Pemanfaatan Barang Milik Daerah; e. Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat; f. Penyidikan; dan g. Ketentuan Pidana.	Baru		UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi).	NA		a. Dikomin-fo; b. BPKPAD; c. Bapperida d. DPUPR; dan e. Bagian Hukum Setda	MS III September	INISIATIF PRAKARSA DPRD (Naskah Penjelasan/ Keterangan belum tersedia, dianggarkan dalam APBD TA 2025)
15	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2024.	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024	Baru		a. PP 12 Th 2019 ttg Pengelolaan Keu Daerah; dan b. Perda Nomor 15 Tahun 2020 ttg Pengelolaan Keu. Daerah.	-	Lap Keu TA 2024 yg tlh diperiks a BPK	a. BPKPAD; b. Semua Perangkat Daerah; c. UOBK dan UOBF; d. BUMD; e. Bag Hukum;	MS II (Juni)	USULAN EKSEKUTIF Daftar Komulatif Terbuka)

NO.	JUDUL RAPERDA	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN DARI	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAM-PAIAN	KET.
			BARU	UBAH		NA	PENJ/ KET			
16.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2025.	a. Perubahan Anggaran Pendapatan TA 2025; b. Perubahan Anggaran Belanja TA 2025; c. Perubahan Anggaran Pembiayaan TA 2025; a. Penganggaran untuk keadaan dan keperluan mendesak.	Baru		a. PP 12 Th 2019 ttg Pengelolaan Keu Daerah; b. Perda Nomor 15 Tahun 2020 ttg Pengelolaan Keu. Daerah.		Nota Keu Perub APBD 2025	a. BPKPAD; b. Semua Perangkat Daerah; c. UOBK dan UOBF; d. BUMD; e. Bag Hukum.	MS III September	USULAN EKSEKUTIF (Daftar Komulatif Terbuka)
17.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2026.	a. Anggaran Pendapatan TA 2026; b. Anggaran Belanja TA 2026; c. Anggaran Pembiayaan TA 2026; d. Penganggaran untuk keadaan dan keperluan mendesak.	Baru		a. PP 12 Th 2019 ttg Pengelolaan Keu Daerah; b. Perda Nomor 15 Tahun 2020 ttg Pengelolaan Keu. Daerah.		Nota Keu APBD 2025	a. BPKPAD; b. Semua Perangkat Daerah; c. UOBK dan UOBF; d. BUMD; e. Bag Hukum.	MS III September	USULAN EKSEKUTIF (Daftar Komulatif Terbuka)



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO
KETUA,

TUNARYO